

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 9, Nomor 2, April 2015**

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting : Muryanti, MA
Sekretaris Penyunting : Puspo Reni Rahayu, S.Sos
Penyunting Pelaksana : Sulistyaningsih, M.Si,
Ahmad Zainal Arifin, P.Hd, Dr. Yayan Suryana,
Sekretariat : Beng Pramono, Arifiartiningih
Desain Sampul & Tata Letak : Kirman
Diterbitkan oleh : Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi : Laboratorium Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta
Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571
Email: sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan
sosiologirefleksif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

Transmitting Charisma: Re-Reading Weber Through The Traditional Islamic Leader in Modern Java <i>Achmad Zainal Arifin</i>	1
Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS <i>Henri Puteranto</i>	31
Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta <i>Sulistyaningsih</i>	49
Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo <i>Suliadi</i>	79
Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-DI Yogyakarta <i>Nurhadi</i>	103
Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008 <i>Sri Roviana</i>	119
Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini <i>Rahmat Edi Irawan</i>	139
Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor <i>Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, dan Funny Mustikasari</i>	155

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif <i>Dudung Abdurahman.</i>	175
Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas Cerpen Pilihan Kompas dan Cerpen Kompas Pilihan <i>Adib Sofia.</i>	191
Pendidikan Damai: Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan <i>Muh. Syamsuddin.</i>	213
Islam dan Pekerjaan Sosial <i>Zulkipli Lessy.</i>	235
Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif <i>Achmad Maulani.</i>	253
Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding Atas Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawé) dan JLFR (Jogja Last Friday Ride) di Kota Yogyakarta <i>Mohamad Jamal Thorik.</i>	281
Dibalik Kekuatan Ideologi dan Kepentingan <i>Hendris.</i>	309

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr.wb.

Dinamika permasalahan umat Islam teramat luas dan menarik untuk dikaji, terkait dengan kelembagaan Islam yang masih eksis selama ini. Peran berbagai macam lembaga tersebut nampak dari upaya yang dilakukannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial yang muncul saat ini, misalnya adanya permasalahan AIDS, kepemimpinan dalam konteks kekinian, isu kekerasan yang muncul dalam sistem pendidikan dan lainnya. Permasalahan tersebut akan dibahas di beberapa artikel Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 9 Nomor 2, April 2015.

Achmad Zainal Arifin menulis tentang *Transmitting Charisma: Re-reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java*. Artikel ini mencoba untuk menelaah kembali pandangan seorang tokoh klasik sosiologi, Max Weber, berkenaan dengan teori kepemimpinan beliau, lebih khusus lagi pandangan tentang karisma. Dalam hal ini, Weber berpandangan bahwa proses modernisasi, khususnya proses rasionalisasi yang tidak lagi bisa dibendung pengaruhnya, akan menyebabkan otoritas kharismatik akan berubah, terutama ke arah model legal-rasional. Keyakinan bahwa kualitas kharismatis, yang biasanya direpresentasikan oleh kekuatan supranatural, yang dalam pandangan Weber akan tererosi oleh proses modernisasi, justru semakin terinstitusionalisasi dalam dunia pesantren dan bahkan diyakini bisa ditransmisikan melalui institusi-institusi yang ada.

Henri Puteranto menganalisis tentang Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS. Penulis menjelaskan problematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasi sosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untuk mampu menjalankan program secara efektif. Namun demikian, dalam

implementasinya akan berhadapan dengan “*body of knowledge*” dari program HIV/AIDS. Menurutnya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi dan mengelola manajemen pengetahuan secara efektif.

Artikel Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta ditulis oleh Sulistyaningsih. Penulis menjelaskan bahwa persoalan sampah, terutama persoalan sampah rumah tangga merupakan persoalan penting yang harus segera disikapi secara bijak. Selama ini pengelolaan sampah rumah dilakukan dengan *system sanitary landfill* yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun setiap hari. Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Pengelolaan TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo sejak tahun 1995 sampai sekarang telah menimbulkan respon yang bervariasi dari masyarakat Desa Sitimulyo. Ada masyarakat yang merespon pro (setuju) terhadap pengelolaan TPA tersebut, namun ada juga yang kontra (tidak setuju) terhadap TPA. Perbedaan respon yang ada disebabkan karena ada masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan adanya TPA di Desa Sitimulyo. *Kedua*, Kebijakan pemerintah Desa Sitimulyo terhadap pengelolaan TPA di Desa Sitimulyo lebih mengikuti aspirasi masyarakat.

Suliadi menulis Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo. Tulisan ini menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon ekspansi tersebut. Menurutnya apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal/perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis yang hanya menciptakan masyarakat petani menjadi tersingkir terhadap akses sumber daya yang ada.

Nurhadi menulis artikel tentang Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-Di Yogyakarta. Faktanya, terdapat perbedaan daya tahan menyebabkan adanya perbedaan dampak bagi setiap rumah tangga yang mengalami bencana. Dampak bencana di daerah rawan bencana Bantul dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) orang yang paling kaya menderita

paling sedikit bencana karena kemampuannya mengurangi dampak bencana dengan memperkuat rumahnya dan menggunakan asset yang dimilikinya, (2) penderitaan yang dialami, menjadikan orang miskin mampu mengurangi dampak dari kejadian bencana di masa depan untuk keberlangsungan hidupnya dengan memaksimalkan modal social sehingga meminimalkan biaya untuk membangun rumah dan (3) kelompok bertahan hidup yang paling rentan terhadap peristiwa bencana karena kekayaannya sudah habis untuk biaya rekonstruksi dan ketidakmampuannya mengurangi biaya buruh.

Sri Roviana menguraikan tentang proses Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. Penulis mejelkaskan bahwa perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai macam organisasi perempuan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, salah satunya organisasi KPI. Penulis menyimpulkan terhadap program yang dijalankan oleh KPI selama ini menunjukkan bahwa KPI Yogyakarta merupakan embrio dari gerakan sosial baru, akan tetapi pertumbuhan gerakan ini perlu menyingkirkan kelemahan yang muncul di tengah jalan: kesulitan membangun ideologi bersama, representasi politik yang ditunjukkan oleh organisasi elit, tidak adanya konsolidasi yang berbasiskan organisasi, ketergantungan kepada donor dan ketidakmandirian dan pembiayaan sukarela untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Rahmat Edi Irawan menulis artikel tentang Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini. Menurutnya saat ini mulai terjadinya pergeseran penonton pasif ke penonton aktif di industri televisi Indonesia. Jika pada masa lalu, banyaknya hambatan, seperti rezim pemerintahan yang represif, tidak adanya pilihan program dan stasiun televisi serta belum adanya regulasi dan regulator menyebabkan lamanya penonton televisi di Indonesia bersikap pasif. Sementara saat ini, pemberdayaan penonton melalui berbagai media dan upaya yang dilakukan KPI menyebabkan kondisinya sudah berubah, penonton mulai aktif bersikap. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatkan sikap kritis mereka, dengan banyaknya melakukan pengaduan atas tayangan yang melanggar regulasi baik melalui KPI atau media massa lainnya.

Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, Dan Funny Mustikasari menganalisis tentang Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi organisasi berpengaruh pada efektivitas

organisasi, salah satunya terkait kinerja. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi di dalam organisasi menimbulkan kepuasan komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan, dalam tulisan ini adalah pendidik di IPDN Jatinangor. Ketika interaksi sosial yang meliputi kontak sosial dan komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, maka hubungan antar anggota organisasi terkait dengan pekerjaan akan berjalan dengan baik, dan kinerja para anggota organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif ditulis oleh Dudung Abdurahman. Penulis menjelaskan Kaum Sufi merupakan realitas sosial yang berbasiskan keagamaan pada komunitas-komunitas tarekat. Tarekat sendiri adalah salah satu bentuk implementasi keislaman yang bercorak esoterik, yang secara sosiologis biasa menampilkan aktivitasnya yang terstruktur dalam kelompok guru dan murid. Hubungan antara keduanya terjalin dalam sistem sosial yang konsisten terhadap moralitas dan spiritualitas masyarakat. Karena itu dinamika sosial Kaum Sufi dalam gerakan-gerakan tarekat itu selalu bercirikan : *pertama*, pengembangan doktrin sufi melalui sistem ritual berfungsi memperkuat solidaritas sosial para penganut tarekat. *Kedua*, peranan Kaum Sufi dalam bentuk hubungan dan partisipasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat pada umumnya menampilkan model gerakan sosial yang unik, khususnya sumbangan mereka terhadap pembinaan spiritual dan moralitas publik di tengah-tengah perubahan sosial. *Ketiga*, tipologi gerakan sosial Kaum Sufi pada umumnya bersifat *inklusifme-pragmatis; eksklusifme-fundamentalis; dan fundamentalisme-pragmatis*.

Adib Sofia menulis artikel yang berjudul Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas *Cerpen Pilihan Kompas* dan *Cerpen Kompas Pilihan*. Hegemoni merupakan konsep yang dikenalkan Gramsci untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik politik, budaya dan ideologi. Pendekatan mendasarnya adanya hubungan yang kompleks dan non mekanik antara budaya dan politik. Gramsci mempertanyakan bentuk kebudayaan manakah yang menjadi budaya massa yang diproduksi kontemporer. *Cerpen Kompas Pilihan* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) dan *Cerpen Pilihan Kompas* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) merupakan kumpulan cerita pendek terbaik yang dimuat di harian *Kompas*, salah satu penerbit terkemuka. Mereka mempublikasikan secara periodik sejak tahun 1970 dan menjadi salah satu produk dari masyarakat.

Muh. Syamsuddin menjelaskan tentang Pendidikan Damai:

sebagai Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan. Penulis menegaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk hegemonik dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Termasuk dalam pendidikan dilakukan melalui proses dehumanisasi dari substansi dan metode pembelajaran. Metode pengajaran yang berlangsung selama ini dilakukan dengan pendekatan pedagogi atau seorang guru, menjadi figur yang sempurna (mengetahui tentang banyak hal) dan siswa hanyalah obyek. Tindakan ini disebut kekerasan pendidikan. Kekerasan ini dapat merusak kepribadian.

Islam dan Pekerjaan Sosial dianalisis oleh Zulkipli Lessy. Menurut Teologi Islam dan lima pilar Islam memiliki sejarah dan peran penting dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial dan masyarakat Muslim. Beberapa efeknya dikaji dengan menggunakan review literatur dan melalui komparasi diantara masyarakat Muslim dan beberapa kelompok agama yang mengikutinya serta menguji teologi Muslim Shi'i dan Muslim Sunni. Konsep utama dari Islam, misalnya : syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji seharusnya dijalankan oleh pekerja sosial Muslim dalam praktiknya dalam masyarakat Muslim.

Achmad Maulani menulis tentang Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif. Penulis menegaskan Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) dipahami sebagai pelopor utama Islam di Indonesia. Bukan hanya karena kelembagaan tradisionalnya sebagai rujukan dalam Islam, akan tetapi karena pengembangan pendidikan Islam yang menonjol serta pengembangan wacana keislaman. Perkembangannya akhir-akhir ini, kedua lembaga tersebut berkontribusi penting dalam membangun dialog antara nilai islam dan budaya lokal.

Artikel terakhir dalam kajian jurnal ini ditulis oleh Mohamad Jamal Thorik dalam tugas akhirnya yang berjudul Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding atas Sego Segawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe*) dan JLFR (*Jogja Last Friday Ride*) di Kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan perbedaan antara Sego Segawe dan JLFR pada pola sosialisasi yang dibagi menjadi 5 mekanisme sosialisasi : 1) imitasi: Sego Segawe menggunakan keteladanan Walikota dan Pegawai Balaikota, sedangkan JLFR menggunakan keteladanan komunitas sepeda; 2) instruksi: Sego Segawe menggunakan Surat Edaran (SE) sebagai himbauan bersepeda, namun aspek instruksi tidak terdapat pada JLFR; 3) desiminasi: Sego Segawe kurang memaksimalkan sarana komunikasi, sementara JLFR menggunakan sarana *social media* dengan

intens; 4) motivasi: Sego Segawe menunjukkan dukungan melalui *reward* kepada pelajar sebagai duta sepeda, sedangkan JLFR menggalang dana untuk pesepeda korban kecelakaan; 5) penataran, Sego Segawe mengalami inkonsistensi pada pelaksanaan kampanye secara parsial, sedangkan JLFR melaksanakan kampanye secara rutin.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti dan menjadi sumber pengetahuan baru. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Wassalamualaikum wr. wb

Redaksi

RESISTENSI PETANI TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KARANGWUNI KULON PROGO

Suliadi

Mahasiswa Pasca Sarjana Sosiologi Fisipol UGM, Yogyakarta

Alamat Email : zulieynew@gmail.com

Abstract

The aim of this thesis is to analyze the peasant resistance against the iron sand mining that occurred in Kulon Progo. This study is based on a political attitude changing among the peasants, who were initially against it turned into approving to the iron sand mining. Using James C. Scott's approach of "moral economy of peasant" and Samuel L. Popkin's "political economy", this research provides descriptive analysis on how this political attitude change of peasants is eventually happen. This study shows that the political attitudes change of peasants in response to the expansion of mining capitalism is nothing more than a political compromise by the peasants in respond to the expansion of mining capitalism. What is actually going to be rejected previously about this issue is the ways of investors or companies and countries in expansion which is capitalist oriented and tend to eliminate the farming community to access the available resources.

Key Words: Capitalism Expansion, Agrarian Conflicts, Peasant and Resistance.

Intisari

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis resistensi petani terhadap pertambangan pasir besi yang terjadi di Kulon Progo. Sebagai titik pijaknya, penelitian ini berangkat dari terjadinya perubahan sikap politik petani, yang pada awalnya melawan menjadi menyetujui terhadap pertambangan pasir besi. Melalui pendekatan "moral ekonomi petani"-nya James C.Scott, dan pendekatan "ekonomi politik" dari Samuel L. Popkin, penelitian ini diulas secara analisis-deskriptif bagaimana perubahan sikap politik petani akhirnya terjadi. Dengan

analisis itulah penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon ekspansi kapitalisme pertambangan. Apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal/perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis yang hanya menciptakan masyarakat petani menjadi tersingkir terhadap akses sumber daya yang ada.

Kata Kunci: Ekspansi kapitalisme, Konflik Agraria, Resistensi dan Petani.

Pendahuluan

Fenomena resistensi petani sepanjang sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari karakteristik rezim penguasa, khususnya terkait dengan karakteristik dalam kebijakan program pembangunannya. Kebijakan pembangunan yang juga terkait dengan kebijakan agrariannya, sangat mempunyai dampak terhadap munculnya resistensi petani. Noer Fauzi Rahman (2010: vii), menjelaskan bahwa dari hasil studi-studi mengenai agraria di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin ditemukan adanya korelasi antara kebijakan hukum agraria dengan tersingkirnya petani terhadap akses atas tanah. Hukum-hukum agraria yang ada lebih sebagai cara bagi penguasa, perusahaan-perusahaan kapitalis untuk mengeksklusi rakyat atas tanahnya. Sehingga dalam sistem kapitalisme rakyat dan tanahnya masuk menjadi modal bagi perusahaan-perusahaan kapitalis, dan dalam situasi seperti itulah resistensi petani akan muncul.

Di Indonesia, sejak otonomi daerah diimplementasikan pada tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatannya, watak dan perilaku penguasa daerah dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) dan sumber-sumber agraria tidak banyak berubah, bahkan di banyak tempat justru menyuburkan konflik agraria yang pada akhirnya juga melahirkan resistensi petani.

Kemunculan resistensi petani, khususnya pasca jatuhnya Orde Baru, sangat dipengaruhi oleh terbukanya kran-kran demokrasi yang sudah lama tertutup. Seiring dengan terbukanya kran demokrasi tersebut, masyarakat petani di desa-desa yang awalnya hanya dijadikan objek politik dan pembangunan dari penguasa orde baru lewat politik *floating mass-nya*, *depolitisasi* dan *de-ideologisasi-nya*, kini menjadi

masyarakat yang aktif dalam mengorganisir dirinya secara politik dan bahkan menolak secara tegas terhadap proyek-proyek negara yang tidak diinginkan oleh mereka (Hans Antlov, 2004: ix).

Dalam konteks politik, menguatnya aksi-aksi petani pasca runtuhnya rezim Orde Baru dengan berbagai macam tuntutan, merupakan titik balik dari kebangkitan gerakan politik petani yang sudah lama hilang dari dinamika politik nasional, khususnya sejak Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Di samping itu, situasi tersebut sekaligus mengkonfirmasi masih terjadinya sebuah kondisi yang dinamakan dengan krisis "agraria"¹.

Secara umum akar krisis agraria menurut Gunawan Wiradi (2009: 9-51) terletak pada fakta terjadinya ketimpangan dan kesenjangan terhadap sumber-sumber agraria, baik dalam bentuk penguasaan maupun pengalokasiannya, serta tumpang tindihnya berbagai macam produk kebijakan hukum yang mengatur atas sumber-sumber agraria tersebut. Berakar dari persoalan di atas itu pulalah "persaingan"² dalam memperebutkan sumber-sumber agraria seringkali meruncing menjadi "konflik agraria"³.

KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) dalam laporan akhirnya menyatakan bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlah konflik agraria telah mengalami peningkatan sebanyak 314% atau 3 (tiga) kali lipat. Dengan rincian sebagai berikut; tahun 2010 terjadi 106 konflik dengan luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 Ha yang melibatkan 517,159 KK. Pada tahun 2012 terdapat 198 kasus konflik agraria yang terdiri dari sektor perkebunan dengan 90 kasus, sektor pembangunan infrastruktur 60 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, pertanian tambak/pesisir 5 kasus dan kelautan serta wilayah pesisir pantai dua kasus, sementara tahun 2013 ada 369

1 Agraria dalam konteks ini penulis mengacu pada penjelasan Gunawan Wiradi (2009). Seperti yang dijelaskan oleh beliau bahwa agraria tidak hanya mencakup tanah dan pertanian saja, melainkan wilayah yang mewadahi semuanya, termasuk didalamnya adalah, air, tambang, hewan tumbuh-tumbuhan dsb.

2 Persaingan dalam hal ini lebih hanya sebatas proses interaksi antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang hanya sebatas "berlomba" untuk menguasai objek-objek agraria, sedangkan konflik sudah lebih mengarah terhadap persaingan yang sudah saling mem blokir jalan lawan dalam memperebutkan sumber-sumber agraria (Wiradi, 2009: 55-56)

3 Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan, dikutip dari (Endang Suhendar, et all, 2002) dalam buku Menuju Keadilan Agraria, 70 Tahun Gunawan Wiradi.

kasus (KPA, 2014).

Satu di antara banyak kasus konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan dan negara adalah konflik agraria yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Secara umum konflik tersebut berpusat pada perebutan lahan antara petani dengan perusahaan penambang pasir besi. Untuk kasus Kulon Progo, konflik yang terjadi sebenarnya bermula ketika petani menolak untuk menyerahkan lahan garapan mereka terhadap perusahaan tambang. Penolakan dan perlawanan petani yang dimulai sejak tahun 2006 yang begitu kuat akhirnya sempat membuat perusahaan melakukan penundaan terhadap rencana operasi seperti yang sudah direncanakan.

Penelitian ini hendak menjelaskan fenomena perlawanan petani dengan menfokuskan terhadap perubahan sikap politik masyarakat petani yang terjadi di Desa Karangwuni, Kulon Progo dalam menanggapi masuknya perusahaan tambang pasir besi. Dengan meletakkan konteks ekspansi kapitalisme di Kulon Progo sebagai suatu bingkai dari penelitian ini dan dengan pendekatan ekonomi politik, studi ini diharapkan dapat menemukan sebuah penjelasan terkait dengan perubahan sikap petani tersebut. Dalam proses penjelasannya penelitian ini menggunakan kerangka teori "moral ekonomi petani"-nya James C.Scott, dan "ekonomi politik" dari Samuel L. Popkin.

Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Karangwuni: Sebuah Cerita "*wong Kecubung*".

Menurut sejarahnya, kondisi masyarakat petani lahan pantai sebelum era kemerdekaan merupakan kelompok masyarakat tanpa tanah (*landless*). Kondisi demikian diakibatkan oleh kebijakan Belanda yang mewajibkan masyarakat Jawa pada saat itu untuk menyerahkan tanahnya kepada pihak kolonial sebesar ½ Ha - ¼ Ha untuk ditanami gula.

Kondisi masyarakat pesisir pantai yang secara historis telah mengalami pemiskinan akibat penjajahan ditambah lagi dengan struktur politik feodalistik yang terus berkembang membuat masyarakat semakin jatuh dalam jurang kemiskinan. Di samping itu, kondisi lahan yang gersang turut memperburuk kondisi kehidupan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Daerah pesisir pantai Kulon Progo sendiri merupakan sebuah lahan yang berupa gundukan pasir gersang dan tandus serta tidak mempunyai nilai ekonomis terhadap masyarakat. Situasi tersebut berlangsung cukup lama dialami oleh masyarakat-masyarakat yang

mendiami lahan pantai tersebut, yang meliputi beberapa kecamatan dan beberapa desa termasuk di dalamnya Desa Karangwuni.

Walaupun lahan pantai tersebut gersang dan tidak menjadi ruang yang bisa menjadi tempat untuk bergantungnya kehidupannya masyarakat, akan tetapi kondisi tersebut telah dirubah oleh masyarakat. Perubahan tersebut terjadi sejak tahun 1980-an, ketika salah seorang petani, Sukarman, mencoba berinisiatif untuk menanam tanaman di lahan pasir tersebut. Setelah melewati berbagai macam cobaan akhirnya usaha tersebut ternyata berhasil.

Sejak itulah masyarakat sudah mulai berani bermimpi bahwa masa depan hidupnya akan terjamin dengan bersandar pada lahan pantai tersebut. Pasca itu, kegiatan bercocok tanam masyarakat mengalami perkembangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas, perkembangan teknik pengairan dan pemupukan membuat hasil panen cabe, melon dan semangka, yang semakin baik dan banyak. Bersamaan dengan itu, jumlah masyarakat yang ikut bercocok tanam juga bertambah banyak (Wasito, 2013: 85-111).

Sebagai gambaran dari hasil pertanian bawang merah, petani akan mendapatkan penghasilan Rp53.085.977,48 untuk setiap hektarnya. Sementara untuk usaha tani komoditas cabe, petani memperoleh penghasilan sebesar Rp 8.668.116,68 untuk setiap hektarnya. Secara keseluruhan, produksi pertanian di 1 hektar lahan pasir bisa memberi keuntungan bersih sebesar lebih dari Rp 30 juta dalam setahun. Hal ini tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan apabila hanya menanam padi pada 1 hektar sawah yang hanya memberi keuntungan maksimal Rp 4 juta setahun (Wasito, 2013:85-111).

Di Karangwuni, rata-rata penduduknya adalah petani yang mengandalkan lahan pasir. Akan tetapi walaupun masyarakat juga ikut mengolah lahan pantai, mereka juga mempunyai tanah tegalan yang secara sertifikat punya mereka dan lahan tersebut juga ditanami cabe, semangka, melon, dan lain-lain. Salah seorang warga Desa Karangwuni, Ibu Sudarmi, mengisahkan bahwa "masyarakat Karangwuni selain mempunyai lahan olahan di pesisir pantai mereka juga mempunyai lahan sendiri yaitu tegalan. Sekarang, - menunjuk pasca lahan di pesisir pantai di jadikan lahan pertambangan-, mereka hanya mengolah lahan tegalan⁴.

Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan bagaimana kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Karangwuni, Kulon Progo,

4 Wawancara dengan Ibu Sudarmi, pada tanggal 24 maret 2014 15.30 blok 2

dari pra kemerdekaan hingga sekarang. Kondisi kemiskinan yang mereka hadapi hingga membuat mereka berinisiatif untuk mengolah lahan pantai yang akhirnya mereka tidak lagi sebagai '*wong kecubung*'. Situasi demikian dapat dipahami bagaimana masyarakat menyikapi kehadiran Perusahaan JMI yang tiba-tiba mau mengusir kehidupan masyarakat, sementara masyarakat dengan daya kreatifnya telah berhasil menciptakan sebuah inovasi dalam bertani dilahan pantai tersebut.

Masyarakat yang menghuni di sekitar lahan pantai tersebut mengalami semacam "mimpi buruk", mereka tidak lagi bisa memanfaatkan lahan pantai untuk kegiatan pertaniannya. Mereka tidak lagi bisa menanam di atas lahan tersebut dan bahkan kesuksesan mereka merubah lahan tersebut menjadi lahan yang subur akan segera sirna dan hilang seiring dengan masuknya perusahaan tambang pasir besi. Di bawah peraturan dan serta legitimasi kultural lainnya petani telah kehilangan keberhasilan mereka dalam menyulap lahan yang gersang menjadi lahan yang subur.

Konflik Agraria dan Kontestasi di Pesisir Pantai: Perebutan Makna di atas Lahan Pantai

Dinamika konflik agraria di Indonesia pada umumnya bermula dari arah kebijakan pembangunan pemerintah yang seringkali melabrak kondisi-kondisi aman di tingkat akar rumput. Secara teoritik paradigma pembangunan pemerintah dari dulu hingga sekarang lebih mencerminkan pembangunan dengan paradigma yang lebih memprioritaskan pertumbuhan secara makro. Model arah pembangunan yang seperti inilah yang seringkali menuai badai dalam tataran praktis.

Di samping itu, munculnya konflik agraria tidak lepas dari adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak, yaitu antara petani di satu pihak dengan pemerintah dan pengusaha di pihak lain. Walaupun kedua belah pihak tersebut, memandang bahwa kandungan pasir besi di lahan pantai mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi dalam hal daya guna dan pemanfaatan atas lahan, masing-masing memiliki tafsir yang berbeda. Bagi petani, lahan tersebut merupakan tumpuan hidup, dan karena itu sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan generasinya. Masyarakat menganggap kehadiran perusahaan pertambangan selain mengganggu mata pencaharian yang selama ini mereka kelola, juga dapat memberikan ancaman terhadap persoalan

lingkungan yang ada di pesisir pantai. Oleh karena itu, masyarakat sedari awal menyatakan penolakannya atas rencana perusahaan tersebut.

Sementara bagi pemerintah dan perusahaan, lahan pantai tersebut dengan kandungan biji besinya merupakan aset daerah dan bahkan nasional, sehingga perlu di eksploitasi untuk menambah pendapatan pemerintah dalam rangka mendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut pemerintah keberadaan pertambangan, selain dapat menyerap tenaga kerja, juga diklaim mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya dengan adanya investasi senilai \$ US 600 miliar atau sekitar Rp5,4 - 6 triliun, dengan 1 juta ton pig iron (besi kasar) per tahun, dan jika nilai jual pig iron diasumsikan \$ US 550/ton (kurs 1 \$US = Rp9.500), maka proyek ini akan menambah pendapatan per tahun dari bukan pajak sebesar Rp156,750 miliar. Pemkab Kulon Progo dari jumlah itu akan mendapat 32% yakni Rp 49,160 miliar per tahun. Karena itu, proyek pertambangan pasir oleh Bupati Kulon Progo, disebut sebagai salah satu mega proyek yang menjadi jembatan emas menuju Kulon Progo baru.

Namun demikian, masyarakat tidak lantas menyetujui begitu saja. Sebaliknya, masyarakat justru memberikan reaksi penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut. Masyarakat menganggap bahwa rencana pertambangan oleh pemerintah tersebut tidak saja akan mengurangi penghasilan mata pencaharian mereka, melainkan juga nantinya dapat mengancam keberlangsungan masa depan generasi mereka. Selain hal itu, alasan masyarakat menolak atas kehadiran pertambangan, juga karena masyarakat telah berhasil mengubah lahan yang awalnya gersang tersebut menjadi lahan yang sangat subur untuk ditanami. Karena itulah masyarakat tetap ngotot untuk menolak kehadiran rencana mega proyek pertambangan pasir besi tersebut. Dalam konteks ini pulalah areal pesisir pantai selatan dengan kandungan bijih besinya yang berkualitas dunia telah menjadi arena kontestasi antara dua kepentingan; pemerintah dan perusahaan di satu pihak, dengan petani setempat di pihak lain.

Resistensi Petani Terhadap Ekspansi Kapitalisme Pertambangan Pasir Besi

Menanam adalah Melawan. Demikianlah semboyan petani pesisir lahan pantai selatan Kulon Progo dalam merespon rencana pertambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT JMI. Bagi petani hanya dengan menanam-lah mereka akan dapat sejahtera. Sebaliknya,

kehadiran perusahaan tambang di lahan yang selama ini mereka kelola merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan kehidupannya. Menurut pandangan petani, masuknya perusahaan tambang tidak hanya akan merusak lingkungan di bibir pantai, melainkan juga bisa mengganggu, serta merusak sistem mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, masyarakat sedari awal keras menolak atas kehadiran penambangan pasir besi di lahan pantai tersebut.

Sebelumnya, masyarakat pesisir pantai tidak pernah membayangkan kalau kondisi kehidupan mereka yang telah tertata dan bahkan telah berubah dari semula "*wong kecubung*" menjadi "*wong untung*" akan mengalami gejolak sosial. Begitu juga, masyarakat tidak pernah membayangkan kalau kehidupan yang selama ini damai dan indah akan mengalami disharmoni sosial.

Namun demikian, keharmonisan dan kedamaian hidup mereka mulai terasa goyah ketika tersiar kabar bahwa lahan yang selama ini dijadikan tumpuan hidup akan direncanakan untuk pertambangan pasir besi. Sejak itu, situasi kehidupan yang damai dan indah mulai tergoncang. Keseharian masyarakat pesisir lahan pantai mulai diselimuti oleh keresahan akan datangnya ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan mereka.

Pelan tapi pasti, keresahan masyarakat tersebut telah berubah menjadi kebencian terhadap pemerintah atas rencana pembangunan mega proyek pertambangan pasir besi tersebut. Kebencian masyarakat menjadi semakin dalam di saat mereka mengetahui bahwa ternyata salah satu orang yang duduk menjadi bagian dari perusahaan itu merupakan keluarga orang nomor satu di Provinsi DIY. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang selama ini dianggap sebagai panutan menghilang, masyarakat menjadi berpikir bahwa ternyata pemimpinnya sama saja yaitu memiliki nafsu serakah dan menindas (Widodo, 2013:10).

Kemarahan masyarakat semakin memuncak, ketika ada beberapa orang yang mengaku dari salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta datang melakukan pemetaan terhadap wilayah pesisir untuk kepentingan penambangan. Melihat situasi demikian masyarakat mulai berpikir bahwa rencana pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari lahan garapannya akan segera menjadi kenyataan. Bersamaan dengan itulah masyarakat meyakini tidak ada jalan lain kecuali melawan atas rencana pertambangan tersebut.

Dengan berlandaskan beberapa alasan di atas akhirnya masyarakat

secara bersama bersikap “menolak harga mati dengan berbagai alasan”. Pilihan tersebut seolah menjadi genderang perang dari masyarakat kepada pemerintah yang ngotot akan melakukan penambangan pasir besi. Sejak itu pulalah masyarakat pesisir Kulon Progo aktif melakukan penolakan terhadap rencana penambangan pasir besi tersebut dengan berbagai macam cara, aksi demonstrasi, audiensi, konsultasi publik, pengiriman petisi dan lain sebagainya.

Dalam strategi perjuangannya, masyarakat petani yang mengorganisir diri dalam wadah Perjuangan Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) menyadari bahwa perjuangan tidak berhasil kalau tidak mendapat dukungan yang luas dari berbagai elemen masyarakat baik yang sedang mengalami kasus serupa, yaitu masalah tanah, ataupun dengan unsur yang lainnya. Menyadari akan pentingnya dukungan dari berbagai elemen, PPLP-KP terus melakukan upaya komunikasi dengan semua kelompok masyarakat, mulai dari petani, seniman, mahasiswa dan juga akademisi.

Salah satu hasil yang terbangun dari komunikasi PPLP-KP adalah terbentuknya Forum Komunikasi masyarakat Agraris (FKMA) pada tanggal 18 Oktober 2010. Gelora perlawanan PPLP-KP dalam menolak kehadiran pertambangan tidak hanya mendapat solidaritas dari sesama petani atau elemen yang berada di dalam negeri. Di Australia perjuangan PPLP-KP telah mendapatkan dukungan dari salah satu kelompok yang bernama Melbourne Anarchist Club Casual Anarchist Federation (CAF).

Secara umum, terdapat tiga alasan utama yang menjadi basis argumen PPLP-KP dalam menolak proyek pertambangan pasir besi. *Pertama*, alasan akan keberlangsungan terhadap masa depan kehidupan petani setempat. Alasan ini juga diperkuat oleh keberhasilan petani dalam melakukan usaha pengolahan lahan pasir kering menjadi lahan subur yang kemudian dapat memberi harapan bagi petani akan masa depan kehidupannya dengan bersandarkan pada hasil pertaniannya.

Kedua, terkait dengan masalah lingkungan. Proyek pertambangan bagi mereka akan mengakibatkan bencana ekologis yang tak terkira. Terutama berkaitan dengan polusi, degradasi pesisir dan erosi pesisir sebagai pertahanan untuk menghadapi tsunami. Dalam konteks ini juga, masyarakat lahan pantai telah belajar dari banyak kasus pertambangan di Indonesia dimana selalu diikuti dengan rusaknya lingkungan setempat. Pelajaran tersebut telah memperkuat alasan petani bahwa dengan masuknya perusahaan untuk melakukan penambangan justru akan merusak terhadap lingkungan disekitar mereka.

Ketiga, adalah terkait dengan hasil penemuan petani dalam mengolah lahan pantai. Bagi masyarakat lahan pantai -tentu saja juga oleh masyarakat secara umum- bahwa penemuan tersebut merupakan pengetahuan lokal yang harus di hormati dan diakui oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah.

Dari Perlawanan hingga Persetujuan: Berbagai Tujuan dan Kepentingan dalam Perlawanan Petani di Kulon Progo

“Uang ganti rugi Rp 75.000 per meter persegi terlalu kecil dibandingkan dengan hasil pertanian para petani. Dia mengaku jika menanam cabai merah satu musim tanam bisa menghasilkan Rp79 juta demikian ungkapan seorang warga karangwuni dalam acara sosialisasi pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik bijih besi pada tanggal 5 september 2013.⁵

Pernyataan di atas merupakan ungkapan Mujiran salah seorang warga Desa Karangwuni saat dia menyatakan penolakan terhadap rencana pertambangan. Namun demikian, ungkapan atas penolakan tersebut kini telah berubah. 10 desa yang meliputi Banaran, Karangasem, Garongan, Pleret, Bugel, Glagah, Palian, Sindutan, Jangkar dan Karangwuni, yang pada awalnya menolak terhadap rencana penambangan pasir besi oleh PT JMI, hingga sekarang tinggal dua desa yaitu desa Garongan dan Pleret.

Khusus Desa Karangwuni, yang sebelumnya menilai bahwa rencana pembangunan pertambangan tersebut akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan masa depan hidup mereka, kini mereka menilai bahwa pembangunan pertambangan itu adalah baik dan harus didukung. Keputusan itu diambil berdasarkan rembukan (musyawarah) seluruh warga Karangwuni. Demikianlah ungkapan salah seorang warga Karangwuni:

“Kami sudah rembukan dan kemudian sepakat untuk menerimanya. Ini berdasar pertimbangan bahwa program pemerintah melalui proyek ini sebenarnya bagus,.. “Yang jelas, kami sudah capek untuk menolak tim mereka (JMI) dan juga ini lama-lama bisa memunculkan masalah sosial. Karena, yang enggak setuju sekarang malah dikucilkan. Sanksi sosial seperti

5 <http://www.starjogja.com/index.php/konflik-tambang-pasir-besi-hadiri-sosialisasi-warga-pplp-tetap-tolak-penambangan-444682>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

ini yang saya nggak kuat.⁶

Selain alasan yang sudah dikemukakan di atas, masyarakat juga mendasarkan alasan persetujuannya terhadap pertambangan pasir besi terkait dengan status hak milik dari lahan yang selama ini mereka garap. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa status tanah lahan yang berada di pesisir yang digarap oleh warga menurut versi pemerintah Yogyakarta adalah tanah Pakualaman *Ground*. Walaupun juga status tersebut banyak dipertanyakan oleh masyarakat yang menolak pertambangan pasir besi, termasuk beberapa NGO yang turut mendampingi petani dalam melakukan perlawanan, akan tetapi alasan itu pulalah yang justru menjadi dasar dari masyarakat untuk menerima kehadiran pertambangan. Ibu Sudarmi seorang warga Karangwuni Blok II menyatakan alasan kenapa masyarakat karangwuni yang semula menolak pertambangan pasir besi justru sekarang mendukung. Beliau menyatakan:

“ya awalnya warga gak setuju, tapi itu kan tanah pemerintah (tanah PA-pen). Pemerintah bilang kalau warga gak mau maka tanah itu akan di ambil paksa dan masyarakat gak akan dapat apa-apa. Maka masyarakat sekarang mendukung, masyarakatberpikir dari pada gak dapat apa-apa mendingan di serahkan lahan yang ada di lahan pantai kepada pemerintah dan mereka dapat ganti rugi. Tanah yang sekarang diolah masyarakat itu tanah tegalan.⁷

Sampai pada titik ini diskursus resistensi petani telah berhadapan dengan fenomena pragmatisme, oportuniste, sebuah sikap yang secara historis memainkan peranan penting dalam diskursus resistensi petani termasuk kelas rendahan lainnya (Santoso, 2004: 311).

Secara sosiologis, konteks sosial yang membingkai kehidupan petani telah memberikan pelajaran kepada petani untuk hidup disiplin termasuk dalam konteks mengamankan kebutuhan materialnya untuk dapat bertahan hidup. Lebih dari itu, petani dapat dikatakan sebagai individu yang sejatinya penuh dengan perhitungan-perhitungan rasional dalam mengambil keputusan, termasuk keterlibatan mereka dalam sebuah perlawanan. Apakah perlawanan tersebut dapat memberikan kepastian bagi mereka akan pemenuhan kebutuhan fundamental mereka atau tidak, merupakan pertimbangan dasar bagi petani untuk

6 <http://jogja.tribunnews.com/2013/11/09/penolak-pasir-besi-di-karangwuni-kulonprogo-kini-berubah-pikiran/>. Diakses pada tanggal 25 April 2014

7 Wawancara dengan Ibu Sudarmi, pada tanggal 24 Maret 2014 15.30 blok 2.

memutuskan keterlibatannya.

Situasi resistensi petani di atas terkonfirmasi juga dalam sebuah penjelasan Gerald W. Mullin dan Genovese tentang makna resistensi kelas rendahan termasuk petani. Mereka menjelaskan bahwa perlawanan sosial yang selalu dicirikan dengan jauh dari kepentingan pribadi, berprinsip, terorganisir, dan mencakup gagasan-gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi tidak sesuai dengan konteks perlawanan di tingkat petani (dikutip dalam Santoso, 2004: 307).

Selain itu, James C Scott dalam sebuah bukunya *Moral Ekonomi Petani*, menjelaskan bahwa walaupun perlawanan petani pada kasus-kasus tertentu mengandung semangat revolusioner, namun apa yang dinamakan tujuan revolusioner itu, bagi kaum tani dan kaum miskin lainnya, tidak dipandang sebagai tujuan, akan tetapi sebagai cara untuk meraih tujuan mereka masing-masing.

Hal tersebut diperkuat dengan analisa Scott terkait dengan kenyataan petani di Tanzania dimana ketika mereka (petani) yang sebelumnya bersama-sama meneriakkan sosialisme, akan tetapi ketika rezim sosialisme berhasil berkuasa mereka (petani) terus bergolak melakukan perlawanan terhadap rezim yang sebelumnya mereka (petani) dukung. Berdasarkan fakta tersebut Scott, menyatakan bahwa ternyata dalam suatu gerakan sosial petani tidak menutup kemungkinan mengandung banyak motif dan tujuan (Scott, 1981: 454-456).

Pada bagian lainya, Scott juga menjelaskan bahwa resistensi petani merupakan sebuah perlawanan yang bersifat prosais, yang berorientasi pada maksud daripada konsekuensi. Dengan demikian, maka setiap tindakan atau perlawanan petani yang harus dicermati terlebih dahulu adalah apa maksud dari perlawanan tersebut. Kegagalan perlawanan petani dalam membawa perubahan tidaklah otomatis akan menghilangkan definisi perlawanan petani sendiri.

Sehingga dengan demikian, definisi perlawanan yang hanya memotret pada model perlawanan yang dihadapkan kepada sebuah anggapan umum bahwa perlawanan semestinya tidak berorientasi kepada individu, tidak untuk memperoleh sejumlah uang, perlawanan harus didasarkan atas pengorbanan jangka pendek demi jangka panjang, atau yang selalu muncul dalam adagium "*berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian*" dan lain sebagainya kurang tepat.

Resistensi petani selalu berhubungan dengan hal atau pilihan-pilihan alternatif yang tersedia bagi petani, sejauh mana alternatif tersebut dapat menguntungkan petani walaupun sekecil apapun sejauh

itulah keputusan petani akan diambil. Maka fakta, bahwa masyarakat pesisir pantai yang mengelola lahan pantai yang sekaligus juga masih mempunyai lahan sendiri (tegalan), dapat dimaknai bahwa masih tersedianya alternatif lain bagi petani untuk menyelamatkan hidupnya walaupun hal itu mereka sadari bahwa dengan diambilnya lahan di pesisir pantai pendapatan mereka akan berkurang.

Situasi tersebut, koheren dengan penjelasan Scott, yang mengatakan bahwa situasi eksploitasi saja tidak dapat menjadi pemicu munculnya resistensi bagi kalangan kalangan kelas pedesaan. Sementara kalau menyimak apa yang terjadi pasca terjadinya ekspansi pertambangan, sepertinya yang nampak adalah bukan semacam eksploitasi terhadap kehidupan petani, melainkan sekedar mengurangi areal yang digunakan oleh petani untuk bercocok tanam. Tentu saja dalam hal ini, kapitalisme telah menjalankan tugasnya untuk mencabut lahan yang dimiliki oleh petani atau telah melakukan satu proses penyingkiran secara pelan-pelan terhadap petani dari lahan garapannya. Sehingga dalam situasi seperti ini, petani masih mendapati jalan alternatif atau setidaknya masih mendapati adanya peluang untuk terus bertahan hidup sehingga katup resistensi terbuka dari petani menjadi tertutup.

Demikianlah faktanya yang terjadi di Desa Karangwuni, Kulon Progo. Dimana telah terjadi "*pembelotan*" yang dilakukan oleh warga Karangwuni yang semula melawan rencana pertambangan pasir besi menjadi mendukung rencana tersebut setelah mereka menerima ganti rugi dari perusahaan. Fakta bahwa warga Karangwuni beramai-ramai melakukan renovasi rumah, mengganti kendaraan dari sepeda motor ke mobil adalah sebuah fakta yang secara keseluruhan bersifat menyenangkan diri sendiri. Disini kita telah dihadapkan kepada sebuah fenomena perlawanan petani yang diwarnai dengan sikap pragmatisme dan oportunisme.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan, bergesernya selera, meluasnya referensi sosial, sebagian masyarakat desa lahan pantai, secara sadar telah merubah paradigma masyarakat dalam menyikapi lingkungannya termasuk kehadiran perusahaan tambang di wilayah mereka.

Dengan demikian, ketika resistensi hanya mengacu kepada sebuah arus yang selalu bersifat terbuka, konfrontatif, bertujuan jangka panjang dan politis maka praktis definisi perlawanan tersebut tidak ditemukan dalam konteks perlawanan atau resistensi (petani), walaupun ditemukan biasanya pemimpin dari perlawanan tersebut adalah tokoh

yang berasal dari kelas menengah. Sebaliknya, jika definisi perlawanan diperluas tidak hanya sebuah gelombang yang bersifat terbuka dan konfrontatif dan bahkan bertujuan jangka pendek, ke dalam perspektif *Scottian*, maka dalam posisi inilah perlawanan petani sebagai kelas rendah menemukan penjelasannya.

Hegemoni atau Kompromi Politik? Mempertimbangkan Rasionalitas dalam Resistensi Petani

Kini kita sampai pada sebuah pertanyaan selanjutnya, yang sekaligus menjadi pintu menuju argumentasi dari studi ini, yakni apakah persetujuan petani terhadap ekspansi pertambangan tersebut merupakan sebuah bentuk kekalahan dari resistensi petani, sehingga sikap tersebut menjadi bukti sikap pasrah petani terhadap kondisi yang walaupun dapat mengancam kehidupan sosial mereka? ataukah sikap tersebut justru telah menjadi bagian dari strategi resistensi petani dalam setiap menghadapi ancaman terhadap kehidupan mereka?

Berangkat dari gambaran di atas pertama-pertama saya perlu memeriksa ulang terkait dengan konsepsi mengenai sikap ke-pasrahan yang dilakukan petani dalam menyikapi ekspansi pertambangan. Konsepsi ini dalam literatur akademik sering dikenal dengan istilah "hegemoni". Kemudian akan saya dudukkan konsepsi tersebut kaitannya dengan "resistensi petani" yang mejadi kajian dalam penelitian ini.

Konsep hegemoni, yang telah di populerkan oleh Gramsci ini, pada dasarnya, bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan yang dibangun dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 1999: 19). Dengan demikian pengertian hegemoni sendiri merujuk pada situasi dimana mereka yang sedang berkuasa, bisa dalam bentuk negara, kaum pemilik modal, maupun kelas-kelas elit lainnya, berhasil membangun sebuah opini dikalangan masyarakat sehingga terjadi mobilisasi persetujuan umum atau suatu nilai atau kepentingan (ideologi) yang dipromosikan sebagai ukuran kepatutan (Santoso, 2004: 294).

Dalam konteks ini, bentuk sikap kepasrahan yang terwujud dalam bentuk persetujuan terhadap ekspansi pertambangan dapat dikatakan sebagai bentuk keberhasilan pemerintah dalam menggiring opini masyarakat kedalam sebuah program pembangunan yang berupa pertambangan. Di sisi yang lain persetujuan tersebut dalam konsepsi hegemoni dapat dijelaskan sebagai sebuah kesadaran semu atau mistifikasi dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga nilai-nilai

yang dibawa oleh para kelas yang berkuasa tidak lagi dianggap sebagai ancaman, sebaliknya situasi tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan alami.

Namun demikian, pandangan Gramsci di atas telah mendapat kritikan dari ilmuwan sosial lainnya. Di antaranya adalah James C. Scott, yang mengatakan bahwa kesadaran semu yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk kekalahan ternyata tidak terbukti. Bahwa apa yang nampak di permukaan sebagai bentuk hegemoni, kepatuhan, penyerahan diri, ternyata dibalik itu tersimpan sebuah perlawanan ulet yang mencengangkan atau dalam istilah Scott disebut "*transkip tersembunyi*".

Menurut Scott, bahwa situasi bertambahnya eksploitasi dan terjadinya ketidakpastian ekonomi dalam sebuah kehidupan petani akan menimbulkan keberangan-keberangan moral walaupun keberangan tersebut tidak mesti akan mewujudkan dalam bentuk pemberontakan atau resistensi terbuka. Hal itu memungkinkan karena dalam setiap keputusan resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh petani, -apakah terbuka atau diam-diam sangat tergantung dengan situasi seberapa besar kemungkinan akan adanya ancaman atau risiko yang datang dari pihak pemerintah atau elit terhadap resistensi tersebut, serta seberapa besar kemungkinan berhasil tidaknya resistensi tersebut ketika terus dijalankan secara terbuka, semua itu sangat mempengaruhi terhadap pilihan bentuk resistensi yang akan dilakukan oleh petani. Pandangan Scott meyakini bahwa nilai-nilai perlawanan dapat ditemukan dalam setiap kebudayaan golongan, karena dalam kebudayaan setiap golongan tersebut mengandung sejumlah aliran yang saling berlainan dan bertentangan.

Oleh karena itu, penjelasan bahwa kepatuhan, persetujuan atau kompromi sebagai bentuk hegemoni yang dilakukan oleh kelas dominan terhadap kelas rendahan tidak lantas menganggap perlawanan petani dapat dianggap telah meredup, karena sikap tersebut bisa jadi hanya sebuah keputusan sesaat yang dihasilkan dari kalkulasi rasional petani setelah mempertimbangkan ancaman atau resiko-resiko yang akan dihasilkan dari sebuah perlawanan itu sendiri.

Dengan demikian, hegemoni yang secara teoritis dapat diprediksi akan melumpuhkan dan membius kesadaran masyarakat, pada tingkat praktis, setidaknya dari hasil penelitian James C Scott, justru menjadi alat yang ampuh bagi masyarakat petani dalam melakukan perlawanan. Dalam konteks ini, sampai batas-batas tertentu, persetujuan masyarakat

terhadap keberadaan eskpansi pertambangan dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kompromi politik, agar tidak tercipta suatu konfrontasi terbuka yang justru akan merugikan petani lebih besar.

Pandangan di atas, juga telah di perkuat oleh pendekatan ekonomi politik-nya Samuel L. Popkin. Walaupun Popkin berbeda pandangan dengan Scott dalam menempatkan petani kaitanya dengan munculnya resistensi petani, yang pertama pendekatan ekonomi politik (rasionalitas petani) sementara yang kedua lebih kepada moral ekonomi bagi petani, akan tetapi dalam pandangan saya kedua tokoh tersebut mempunyai pandangan yang sama khususnya dalam penjelasannya mengenai pilihan-pilihan protes petani.

Popkin lewat bukunya *The Rational Peasant* menjelaskan, bahwa petani sebagai makhluk rasional yang oleh karenanya mereka selalu mengejar-ngejar tujuannya secara rasional. Rasional yang dimaksudkan oleh Popkin dalam konteks ini adalah lebih dimaksudkan kepada sesuatu yang dapat dihasilkan dari tindakan atau keputusan yang telah diambilnya oleh mereka yang sesuai dengan harapan-harapan dan nilai-nilai mereka. Lalu apakah dalam hal ini petani bersifat pragmatis dan mementingkan sendiri? Berkaitan dengan hal itu, Popkin menjawab bahwa pada dasarnya petani itu selalu memperhatikan kesejahteraan dan keamanan mereka sendiri dan keluarganya (Popkin, 1986: 25).

Menurut pandangan Popkin, munculnya resistensi petani bukanlah karena adanya ancaman melainkan karena kehadiran kapitalisme dapat melahirkan sebuah risiko yang justru akan menggiring petani kedalam ketidakpastian dalam menjalani kehidupan mereka. Sejauh mana kehadiran sistem tersebut dapat memperburuk kondisi kehidupan sosial masyarakat sangat berpengaruh munculnya resistensi petani baik dalam bentuk maupun skalanya.

Gambaran situasi di atas itulah yang juga tergambar dari apa yang terjadi di Desa Karangwuni. Walaupun pada faktanya masyarakat Karangwuni telah menyatakan persetujuan dengan berbagai macam alasan normatifnya; pertambangan itu bagus dan akan memberikan kesejahteraan mereka, alasan lahan tersebut merupakan lahan negara karena itu harus diserahkan kepada negara, akan tetapi pada tataran praktis, muncul juga alasan-alasan yang cenderung bersifat terpaksa dan pragmatis. Misalnya; dengan alasan bahwa ketika mereka tidak setuju terhadap pertambangan maka tanahnya pasti akan di ambil oleh pemerintah dan tidak akan mendapat ganti rugi, sebaliknya ketika menyerahkan mereka akan dapat ganti rugi.

Alasan lainnya misalnya, bagi orang-orang yang tidak setuju maka apabila orang tersebut mengalami kecelakaan tidak akan mendapat santunan. Oleh karena itu, argumentasi bahwa persetujuan yang dilakukan oleh masyarakat Karangwuni terhadap ekspansi pertambangan sebagai bentuk kekalahan atau hegemoni perlu mendapat catatan kritis- kalau tidak mau dikatakan bahwa persetujuan tersebut adalah merupakan sebuah kompromi politik petani terhadap pemerintah dan perusahaan.

Pada titik ini persetujuan masyarakat petani Karangwuni, dengan berbagai macam alasannya, terhadap ekspansi pertambangan tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kepasifan, apalagi *hegemoni*, atau bentuk kekalahan petani dalam menanggapi ekspansi pertambangan di wilayah mereka. Sebaliknya, dapat dijelaskan bahwa sikap politik tersebut lebih merupakan sikap rasional petani dalam menyikapi ekspansi pertambangan sehingga dengan kata lain sikap tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kompromi politik petani dalam melawan ekspansi kapitalisme. Dalam konteks ini pulalah petani dapat dikatakan sedang menjalankan "taktik politik" nya dalam melakukan perlawanan terhadap meluasnya ekspansi kapitalisme pertambangan yang berada di pesisir pantai Kulon Progo.

Tanpa bermaksud untuk mendramatisir apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Karangwuni, setidaknya menurut pandangan mereka, hanya dengan bersikap memberikan jalan terhadap masuknya ekspansi kapitalisme pertambangan itulah mereka dapat mengurangi tingkat penderitaan dan sampai batas-batas tertentu, bisa bertahan hidup serta bisa terus berupaya menggapai harapan hidup yang lebih baik. Bagi para petani pilihan sikap tersebut, walaupun kedengarannya pragmatis dan bersifat jangka pendek hanya dalam makna mementingkan kebutuhan material sesaat demi menyenangkan diri sendiri dan bahkan mungkin sulit diterima oleh kalangan masyarakat kelas menengah lainnya, merupakan sikap yang harus diambil demi keselamatan hidup mereka.

Resistensi Petani terhadap Ekspansi Kapitalisme Pertambangan: Sebuah Usaha untuk Meraih Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalisme

Selanjutnya apa yang dapat kita pelajari dari dinamika resistensi dalam konteks sekarang dimana kapitalisme terus tumbuh dan berkembang -dimana kapitalisme telah berhasil memperluas referensi sosial sehingga nilai-nilai, ukuran dan orientasi dan dinamika kehidupan

masyarakat desa juga turut berubah- atau bagaimana kita mendudukan fenomena resistensi petani dalam bingkai kapitalisme? Atau pertanyaan teoritiknya, apakah resistensi petani setelah menyetujui beroperasinya pertambangan, dapat di katakan sepenuhnya sebagai bentuk perlawanan yang mengemban spirit moral dengan maksud untuk mempertahankan lembaga-lembaga tradisonal, seperti yang dijelaskan oleh James C. Scott, ataukah perlawanan tersebut telah bergeser dari sebuah perlawanan ala *Scottian* menjadi sebuah perlawan untuk meraih kesejahteraan dalam sistem kapitalisme dan bahkan lebih ekstrim-nya dapat dikatakan sebuah perlawanan yang memuat semangat pasar atau kapitalisme?.

Pertanyaan tersebut di atas sangat relevan untuk diajukan di tengah perkembangan ekonomi politik global yang sudah terkontrasikan ke arah globalisasi yang secara signifikan telah mengubah dinamika hubungan pertukaran dan produksi agraria di dalam dan di antara negara-negara yang berada di utara-selatan.

Saturnino M. Borrás JR,dkk (2010: 2) menjelaskan bahwa kompleksitas sebagai dampak dari perubahan-perubahan ekonomi politik global telah mempengaruhi terhadap gerakan-gerakan sosial pedesaan dalam berbagai bentuk, yaitu *pertama* bentuk gerakan sosial pedesaan sebagai dampak dari perkembangan ekonomi global; yaitu gerakan yang bergerak dalam ranah lokal dan paing jauh dalam lingkup nasional, *kedua* gerakan yang berbicara dalam ranah isu-isu pembangunan dengan memberikan layanan sosial kepada masyarakat. *Ketiga*, gerakan pedesaan yang telah berjejaring dengan gerakan-gerakan transnasional.

Akan tetapi di atas semua itu, yang patut dipahami sebagai dampak dari meluasnya arus kapitalisme tersebut adalah keniscayaan akan munculnya metode-metode baru dalam upaya melakukan analisa terhadap dinamika gerakan sosial pedesaan atau resistensi petani. Hal tersebut tentu menjadi penting dalam rangka membangun pemahaman yang kontekstual dan komprehensif tentang sebuah makna dari resistensi petani itu sendiri.

Fakta bahwa gambaran kondisi pedesaan pada era sekarang dengan berbagai macam dialektika yang mempengaruhinya, yang kesemuanya tentu mengarah kepada kapitalisme, tidaklah seperti apa yang digambarkan oleh James C. Scott, ketika melakukan riset di beberapa wilayah Asia tenggara. Begitu juga, tidak seperti yang digambarkan oleh Samuel L. Popkin. Wajah pedesaan sekarang sudah berjaln-kelindan dengan sebuah wajah kapitalisme. Kapitalisme telah

membuat batasan desa - kota menjadi sangat cair dan kabur atau dalam istilah David Harvey "*time space compressions*" mengkerutnya ruang dan waktu (dikutip oleh Nor Fauzi rahman, 2010). Ukuran masyarakat kota dengan gaya hidup "mewah" atau gaya hidup "*hedonisme*", *konsumerisme*-nya tidak jarang juga ditemukan di masyarakat desa.

Wajah desa tidaklah lagi menjadi wajah eksklusif yang selalu lekat dengan ciri hidup sederhana, hanya mempertimbangkan kebutuhan subsisten. Kondisi kehidupan kini tidak lagi saja bersandar pada parameter-parameter atau nilai-nilai masa lalu, begitu juga pilihan-pilihan petani dalam melakukan terobosan hidupnya tidak lagi ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lokal sebagai mana yang pernah terjadi dalam masa lalu. Kini kehidupan di desa menjadi ter/ *di-inklusif*kan, oleh sebuah arus yang namanya sistem kapitalisme.

Demikianlah faktanya yang terjadi di Desa Karangwuni. Hasil yang diperoleh dari pengamatan/observasi⁸ peneliti, pasca terjadinya penerimaan ganti rugi dari perusahaan oleh warga karangwuni, masyarakat telah "*berlomba-lomba*" untuk membeli mobil. Bahkan salah seorang warga mengatakan bahwa masyarakat desa karangwuni sekarang sudah tidak lagi main *dealer* melainkan *showroom*, untuk menunjukkan bahwa masyarakat sekarang sudah berganti mobil sebagai kendaraan pribadinya.

Posisi inilah penjelasan Samuel L. Popkin tentang perlawanan petani menjadi relevan. Bagi Popkin, bahwa resistensi petani bukanlah untuk mempertahankan tradisi-tradsisi yang sifatnya sudah mengakar atau hanya untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya belaka. Akan tetapi, sebagai bentuk usaha penjinakan (*to late*) terhadap kapitalisme. Karena itu, dengan meletakkan resistensi petani dalam sebuah konteks arus perkembangan kapitalisme dengan beragam dampaknya, maka perlawanan petani Kulon Progo terhadap ekspansi kapitalisme pertambangan pasir besi tidaklah hanya sebatas ditempatkan sebagai sebuah reaksi untuk mempertahankan sistem subsistensi petani, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai kesejahteraan dalam sistem kapitalisme.

Penutup

Hal yang bisa kita simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa resistensi petani terhadap pertambangan pasir tidak bisa dilihat secara

8 Observasi awal dalam penelitian ini lakukan pada tanggal 17 Maret 2014

dalam dua begitu saja: petani di satu pihak, perusahaan dan pemerintah di pihak lain. Lebih dari dari resistensi yang terjadi juga harus diletakan dalam konteks ruang demokrasi, pasca jatuhnya Suharto, sistem pemerintah yang berlaku di Yogyakarta, serta juga yang tidak kalah pentingnya adalah ruang sistem kapitalisme yang mengalami perkembangan seperti sekarang ini. Karena itu pula, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sikap politik masyarakat dalam merespon pertambangan harus juga diletakan dalam relasi-relasi yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, maka dinamika resistensi petani yang di Kulon Progo, dengan berpijak pada perubahan sikap politik petani, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, mengingat secara sosiologis kehidupan petani selalu dekat dengan apa yang disebut oleh Scott, sebagai garis batas subsistensi, maka prinsip yang sifatnya jangka panjang, perubahan struktural dst. kurang berlaku bagi kelas petani, yang berlaku adalah apa yang bisa di selamatkan untuk kehidupan sekarang, besok lusa, dan seterusnya. Resistensi dalam konteks masyarakat petani, tidak akan jauh dari hal-hal yang bersifat *selective incentive*, pragmatisme, oportunistik. Namun demikian, disinilah rahasianya dalam memahami resistensi yang terjadi di kelas rendah/petani. Sebuah resistensi prosais yang tidak bisa dipahami dalam kaca mata definisi perlawanan sebagaimana yang berlaku di perlawanan buruh ataupun kelas menengah lainnya.

Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sikap politik petani sebagai bagian dari kompromi politik tepatnya sebagai strategi politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan. Munculnya kompromi politik dalam dinamika resistensi petani sangat mungkin terjadi karena selain yang dijelaskan di atas, hal tersebut juga sangat berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Popkin mengenai ekonomi politik kaum tani dalam bukunya *The Rational Peasant*. bahwa dalam pengambilan keputusannya petani sangat berkaitan dengan kalkulasi rasionalitas petani itu sendiri. Di pengertian ini, penentuan keputusan petani selalu mempertimbangkan hal yang dapat diperolehnya dari hasil keputusan tersebut. *Ketiga*, sebagai akibat terjadinya pergeseran nilai-nilai referensi sosial sebagai akibat dari pesatnya perkembangan kapitalisme, maka dinamika resistensi petani terhadap pertambangan pasis besi, tidak lebih merupakan sebuah usaha untuk meraih kesejahteraan masyarakat dalam sistem kapitalisme yang sudah maju seperti sekarang ini.

Daftar Bacaan

- Adian, Donny Gahral.(2002). Menabur Kuasa Menuai Wacana. Dalam majalah Basis No. 01-02, Tahun Ke-51, Januari-Februari 2002.
- Berger, Peter.L.(1990). Revolusi Kapitalis. Jakarta: LP3ES
- Caldwell, Malcom dan Utrecht, Ernest.(2011). Sejarah Alternatif Indonesia. Yogyakarta: Djaman Baroe dengan Sajogyo Institute, Bogor
- Creswell, John W.(1998). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: SAGE Publications
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S..(2009). Handbook of Qualitative research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, AAGN Ari dan Eko, Sutoro (Ed).(2003). Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE press.
- Foucault, Michel.(2002). Power/Knowledge, Wacana Kuasa/ Pengetahuan, (Yudi Santosa:Terjemahan). Jogjakarta: Bentang
- Haryatmoko.(2002). Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan bersama Foucault. Dalam majalah, Basis No. 01-02, Tahun Ke-51, Januari-Februari 2002.
- Jati,Wasisto Raharjo. (2013). Predatory Regime dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013.
- Kahin, Goerge McTurnan.(1995). Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: UNS dan Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono.(1984). Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kuniko, Yoshihara.(1990). Kapitalisme Semu di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo.(1994). Radikalisasi Petani. Yogyakarta: Bentang
- Kusdi, Aminuddin.(2001). Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur 1960-1965. Yogyakarta: Jendela.
- Kusumoharyono, Umar.(2006). Eksistensi Tanah Kasultanan (SULTAN GROUND) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No. 5 / 1960, dalam Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006.
- Luthfi, Ahmad Nashih.(2012). Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis SIPN, 2012). Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- M. Borrás Jr, Saturnino, Marc Edelman dan Cristobal Kay (Ed).(2010). GERAKAN-GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

- M. Siahaan, Hotman.(2000). Gerakan Sosial Petani Terhadap Kekuasaan Negara. Dalam 100 Tahun Nusantara. Jakarta: Kompas.
- Moh. Nazir, Ph. D.(2005). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Patria, Niezar dan Arief, Andi.(1999). Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poerwokoesoemo, KPH.MR. Soedarisman.(1986). Tanggapan atas desertasi berjudul; Perubahan Sosial di Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Popkin, Samuel L.(1986). Petani Rasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Pratikno, Fadjar.(2000). Gerakan Rakyat Kelaparan, gagalnya politik radikalisasi petani. Yogyakarta: Media Peressindo.
- Rachbini, Didik J.(1994). Perspektif Teori Ekonomi Politik Baru, Kajian terhadap Negara, Masyarakat dan Pasar. Dalam Teori Ekonomi Politik Baru. Prisma, 3 Maret No 3 Tahun XXIII 1994.
- Rachman, Noer Fauzi.(2011). "KAPITALISME ADALAH SEBAB, AGRARIA ADALAH AKIBAT" Menyegarkan Pemahaman mengenai Percepatan dan Perluasan Kapitalisme Indonesia. Naskah yang diedarkan dalam rangka kado untuk mereka yang merayakan Hari Agraria 24 September 2011.
- Sakai, Minako.(2002). Konflik sekitar Devolusi Kekuasaan Ekonomi dan Politik: Suatu Pengantar. (The University of New South Wales)
- Santana K. Septiawan.(2010). Menulis Ilmiah, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, James C. (1981). Moral Ekonomi Petani. Jakarta:LP3ES
- Scott, James C. (1993). Perlawanan Kaum Tani.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Shirashi, Takashi.(1997). Zaman Bergerak, Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Garfiti
- Soetrisno, Loekman.(1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius
- Sohibudin, Moh.(2009). Metodologi studi Agraria:karya-karya terpilih Gunawan Wiradi. Bogor: Sajogyo Institute.
- Sotarto, Endriyatmo (Ed).(2010). Pemikiran Agraria Bulaksumur Telaah Awal Atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubiyarto. Yogyakarta: STPN Press
- Susanto, Hery.(2004). Perlawanan di Simpang Jalan: Konteks Harian di Desa-desa sekitar Jawa. Yogyakarta: Damar
- Sutaryono, Amien Tohari dkk.(2012). Perjuangan Untuk Menjadi Bagian dari Proses Perubahan Agraria yang Menguntungkan

(Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi) dalam Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012, Hal: 35-69. STPN Yogyakarta

Tauchid, Mochammad.(2009). Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press

Tjondronegoro, S.M.P dan Gunawan Wiradi.(1998). Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Triono, Lambang dan Nasikun. (1992). Proses Perubahan Sosial di Jawa. Seri monograf No. 3 Maret 1992. Fakultas ilmu osial politik UGM dan CV rajawali.

Van Klinken, Gerry.(2007). Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.

Wibowo, I dan Wahono, Francis (Ed). (2003). Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Widodo. (2013). Menanam adalah Melawan!.Yogyakarta: PPLP-KP dan Tanah Air Beta

Wiradi, Gunawan.(2013). Catatan Ringkas, Konflik Agaria Untuk diteliti. Bahan kuliah dalam salah satu acara pelatihan penelitian sejarah yang diselenggarakan oleh LIPI di Jakarta, 17 Oktober 2013.

Yunianto, Bambang.(2009). Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo, Yogyakarta dalam Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Volume 05, Nomor 13, Januari 2009; hlm.10.

Sumber Lain :

Majalah BALAIRUNG Edisi 46/XXVII/September 2012.

<http://finance.detik.com/read/2008/11/04/145945/1031064/4/kontrak-karya-tambang-pasir-besi-dikulonprogo-diteken>. diakses Tanggal 10 februari 2014.

http://www.tekmira.esdm.go.id/publikasitekmira/jurnal/jurt_ekmirajan2009.pdf tanggal 10 September 2013. diakses Tanggal 10 Maret 2014.

<http://www.tempo.co/read/news/2009/03/24/058166386/Penambangan-Pasir-Besi-Ancam-Eksistensi-Petani-Kulonprogo>

https://www.academia.edu/5131691/Predatory_Regime_dalam_Ranah_Lokal_Konflik_Pasir_Besi_di_Kabupaten_Kulon_Progo. diakses Tanggal 2 Januari 2014.

<http://www.kpa.or.id/?p=2947>. diakses tanggal 8 Januari 2014

https://www.academia.edu/4892667/Konflik_Mega_Projek_Tambang_Pasir_Besi_Kulon_Progo,_Anatomi_Eskalasi_Resolusinya. AB. Widyanta. diakses Tanggal 2 Januari 2014.

<http://progoupdate.com/pasir-besi-konflik-dan-jembatan-emas-kulon-progo>. diakses 4 April 2014.

<http://lipus.kompas.com/grammyawards/read/2009/04/27/18235017/Kawasan.Selatan.Wajah.Ketakberdayaan>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2014